

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Pengelolaan Program

2.1.1.1 Pengertian Pengelolaan Program

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "pengelolaan" adalah Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Pengelolaan berfungsi sebagai alat vital untuk menjembatani kesenjangan antara aspirasi dan hasil nyata organisasi. Menurut Handoko dalam Alamsyah et al., (2022.hlm.41), Pengelolaan adalah proses kolaboratif di mana seseorang bekerja sama dengan individu lain untuk menetapkan, merumuskan, dan merealisasikan sasaran organisasi yang dicapai melalui perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia (*staffing*), penggerakkan dan kepemimpinan (*Actuating/leading*), serta pengawasan (*controlling*). Sedangkan Menurut George R. Terry dalam (Astuti & Ilyas, 2024, hlm.157) Pengelolaan adalah suatu proses khusus yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/gerakan, dan pengendalian/pengawasan. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia. Pengelolaan dalam pendidikan bukanlah sekadar menjalankan tugas, melainkan merupakan serangkaian proses aktivitas sistematis yang terintegrasi (Nengsih et al., 2023).

Pengelolaan pada dasarnya adalah proses penting untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai, kemudian menetapkan langkah dan sumber daya yang akan digunakan secara efisien dan efektif (Wakila, 2021). Pengelolaan dalam pendidikan berarti kunci keberhasilan setiap institusi pendidikan. Ini mencakup langkah-langkah sistematis untuk perencanaan dan pengawasan jangka panjang, pemantauan dan pengawasan, pengorganisasian sumber daya, disiplin sekolah yang baik, penyusunan kebijakan, dan pengendalian kegiatan. Tujuannya adalah untuk menjadikan siswa menjadi orang yang diterima di masyarakat, perusahaan, dan institusi (Donkoh et al., 2023).

1) Prinsip-Prinsip Pengelolaan

Prinsip-prinsip pengelolaan berfungsi sebagai landasan teoretis dan regulasi fundamental yang esensial dalam proses pengambilan keputusan manajerial, khususnya saat menghadapi berbagai permasalahan dalam organisasi. Prinsip-prinsip ini bertugas untuk membantu manajer mencapai keseimbangan optimal dalam setiap proses pengambilan keputusan dan tindakan, sehingga pada akhirnya memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai secara maksimal dengan upaya yang terarah dan efektif. Menurut Aziz dalam Rama et al., (2022, hlm.133) Prinsip-prinsip pengelolaan berfungsi sebagai kompas moral dan operasional yang harus dipegang teguh oleh setiap manajer pendidikan untuk memastikan lingkungan belajar yang terarah dan produktif:

- a) **Prioritaskan Tujuan di Atas Kepentingan Pribadi dan Rekan Kerja.** Manajemen pendidikan harus selalu berpegangan pada asas supremasi tujuan lembaga. Artinya, setiap keputusan dan tindakan yang diambil harus senantiasa mengutamakan pencapaian visi, misi, dan sasaran pendidikan di atas segala bentuk kepentingan individual, kelompok, atau preferensi pribadi manajer maupun rekan kerja. Ini menegaskan pentingnya objektivitas dan profesionalisme dalam kepemimpinan.
- b) **Mengkoordinasikan Kompetensi dan Tanggung Jawab.** Prinsip ini menuntut adanya keselarasan integral antara kemampuan (kompetensi) yang dimiliki oleh personel sekolah dengan lingkup tugas (tanggung jawab) yang diberikan kepada mereka. Manajemen harus memastikan bahwa setiap peran yang dibentuk memiliki kejelasan wewenang dan diisi oleh individu yang memiliki kualifikasi, keterampilan, dan keahlian yang memadai. Koordinasi yang efektif menjamin efisiensi kerja dan meminimalkan kesenjangan kinerja.
- c) **Pendelegasian Tanggung Jawab kepada Personel Sekolah Harus Sesuai dengan Sifat dan Kompetensinya.** Dalam konteks pendelegasian wewenang, prinsip ini menekankan pentingnya

penugasan yang tepat sasaran. Tanggung jawab harus didelegasikan tidak hanya berdasarkan jabatan, tetapi terutama berdasarkan kompetensi spesifik dan sifat pekerjaan yang akan ditangani. Hal ini memberdayakan staf secara maksimal, memastikan bahwa tugas ditangani oleh individu yang paling mampu, serta menumbuhkan rasa kepemilikan dan akuntabilitas yang lebih tinggi di kalangan personel sekolah.

- d) Familiar dengan Faktor Psikologis Manusia. Manajemen yang efektif harus memiliki pemahaman mendalam terhadap dinamika psikologis, motivasi, dan kebutuhan emosional seluruh anggota organisasi— termasuk guru, staf, dan peserta didik. Prinsip ini mengharuskan manajer untuk menerapkan pendekatan humanis dalam kepemimpinan, mengakui bahwa faktor-faktor seperti moral, kepuasan kerja, dan lingkungan psikologis yang suportif sangat menentukan kinerja dan loyalitas staf.
- e) Relativitas Nilai. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam manajemen pendidikan, nilai-nilai, keputusan, dan metode kerja tidak bersifat mutlak atau tunggal. Keberhasilan dan penerapan suatu pendekatan akan selalu relatif terhadap konteks, situasi, waktu, budaya organisasi, dan kebutuhan spesifik lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena itu, manajer harus memiliki fleksibilitas dan kearifan untuk menyesuaikan prinsip-prinsip manajemen dengan kondisi faktual di lapangan, bukan sekadar menerapkan aturan secara kaku.

2) Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan menurut (Wasliman et al., 2022.hlm.51) merupakan sasaran akhir yang hendak dicapai (direalisasikan). Tujuan ini tidak hanya menggambarkan ruang lingkup spesifik dari aktivitas manajer, tetapi juga menentukan arah upaya manajerial yang diperlukan. Penetapan tujuan pengelolaan dianggap fundamental dalam setiap organisasi karena berfungsi sebagai pilar yang mendasari seluruh aktivitas dan pengambilan

keputusan. Tiga alasan utama yang menggaris bawahi pentingnya tujuan manajemen adalah:

- a) Landasan Pencapaian Tujuan Organisasi dan Individu. Tujuan pengelolaan berfungsi sebagai titik fokus utama (*focal point*) untuk mengarahkan seluruh sumber daya dan upaya yang ada. Tujuan yang jelas memberikan arah strategis dan menyelaraskan setiap departemen atau unit kerja menuju visi bersama. Tanpa tujuan yang ditetapkan, tindakan organisasi cenderung sporadis dan tidak efektif.
 - b) Mekanisme Penyeimbang Konflik Kepentingan. Organisasi sering kali dihadapkan pada tujuan yang saling bertentangan. Tujuan pengelolaan berfungsi sebagai kerangka acuan (*referensi*) untuk menjaga keseimbangan dinamis antara berbagai kepentingan *stakeholder* yang berbeda. Dengan tujuan yang jelas, manajer dapat membuat keputusan yang mengintegrasikan atau mengkompromikan tujuan yang berlawanan tersebut, memastikan keberlanjutan dan keharmonisan organisasi.
 - c) Pendorong Efisiensi, Efektivitas, dan Produktivitas. Tujuan pengelolaan adalah standar kinerja yang memungkinkan dilakukannya pengukuran dan evaluasi. Hal ini secara langsung meningkatkan performa operasional:
 - (1) Efisiensi: Tujuan yang spesifik memungkinkan manajer untuk mengalokasikan sumber daya (waktu, tenaga, modal) dengan cara yang paling optimal dan meminimalkan pemborosan.
 - (2) Efektivitas: Tujuan yang terukur menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana hasil yang diinginkan telah tercapai. Ini memastikan bahwa organisasi melakukan hal yang benar.
 - (3) Produktivitas: Dengan fokus dan standar yang ditetapkan oleh tujuan, kinerja karyawan dan sistem dapat dioptimalkan untuk menghasilkan *output* tertinggi, yang merupakan kunci bagi daya saing organisasi.
- 3) Unsur- Unsur Pengelolaan

Menurut Mulyadi & Winarso (2020, hlm.6) Dalam rangka menjalankan fungsi manajemen yang efektif, setiap organisasi, institusi,

termasuk lembaga pengembangan ilmu dan keterampilan, sangat memerlukan seperangkat sumber daya fundamental yang dikenal sebagai Unsur-Unsur Manajemen (6M). Unsur-unsur ini beroperasi sebagai sebuah sistem yang terintegrasi secara erat. Oleh karena itu, kekurangan atau disfungsi pada salah satu elemen krusial ini akan secara langsung dan signifikan menghambat pencapaian target organisasi pembelajaran. Adapun Unsur-Unsur esensial dalam pengelolaan antara lain:

(1) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan penggerak utama (*prime mover*) seluruh aktivitas institusional. Semua kegiatan, mulai dari penyusunan kurikulum hingga pelaksanaan proses ajar-mengajar, sepenuhnya bergantung pada SDM (dosen, guru, staf administrasi, pimpinan). Tanpa pemenuhan personel yang berkualitas, tidak akan ada aktivitas yang dapat dilaksanakan dalam lembaga ini.

(2) Anggaran

Anggaran berfungsi sebagai alat ukur nilai ekonomis dan alat tukar. Cakupan dan kualitas program diukur secara rasional berdasarkan alokasi dana yang tersedia. Ketersediaan dana memungkinkan manajemen untuk menjalankan program secara lebih leluasa. Anggaran menjadi instrumen vital untuk mencapai tujuan, karena setiap komponen—mulai dari kompensasi tenaga pengajar, pengadaan sarana, hingga proyeksi peningkatan fasilitas—harus diperhitungkan secara finansial.

(3) Fasilitas dan Bahan Ajar

Selain sumber daya insani, pengelolaan memerlukan fasilitas dan bahan ajar sebagai komponen pendukung proses transfer ilmu. Material ini mencakup perlengkapan ajar, buku referensi, modul, hingga infrastruktur fisik yang esensial dalam mendukung fungsi utama lembaga.

(4) Teknologi dan Peralatan

Teknologi dan Peralatan (termasuk sistem informasi dan perangkat keras) berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi maupun proses pembelajaran. Integrasi teknologi memastikan bahwa kegiatan institusi dapat berjalan lebih cepat, terstruktur, dan konsisten.

(5) Prosedur Kerja

Metode merujuk pada standar baku pelaksanaan kerja (SOP) yang memandu setiap kegiatan lembaga. Penetapan metode yang tepat harus mempertimbangkan tujuan, batasan waktu, anggaran, dan fasilitas yang ada, guna memastikan seluruh kegiatan operasional (misalnya, penerimaan peserta didik, evaluasi hasil belajar) terlaksana secara efisien.

(6) Market

Market (atau permintaan masyarakat) adalah faktor eksternal yang menentukan relevansi dan keberlanjutan lembaga. Lembaga wajib melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dunia kerja dan masyarakat pengguna lulusan untuk memastikan bahwa program yang ditawarkan dan kompetensi lulusan tepat sasaran, sehingga menjamin keberlanjutan institusi.

4) Fungsi Pengelolaan Program

Fungsi pengelolaan merupakan serangkaian kegiatan yang saling terkait dan dijalankan secara sistematis oleh manajer untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Fungsi-fungsi utama pengelolaan secara umum diringkas menjadi lima komponen inti, sering disebut POACE atau POAS (*Planning, Organizing, Actuation/Leading, Controlling, Staffing*). Namun Pandangan para ahli klasik menunjukkan sedikit variasi dalam mengelompokkan tugas manajerial.

- a) Henry Fayol, yang dikenal sebagai bapak teori administrasi modern, mengelompokkan fungsi manajemen menjadi lima, yang meliputi:

perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pemberian perintah (*commanding*), pengoordinasian (*coordinating*), dan pengawasan (*controlling*).

- b) George R. Terry merangkumnya menjadi empat fungsi yang lebih ringkas, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).
- c) Lyndall F. Urwick mengusulkan daftar yang lebih panjang dengan enam fungsi, yang mencakup: penyusunan personalia (*staffing*), perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengawasan (*controlling*), pemberian perintah (*commanding*), dan pengoordinasian (*coordinating*).

Meskipun pandangan para ahli menunjukkan sedikit variasi dalam mengelompokkan tugas manajerial namun intinya tetap berpusat pada penetapan arah dan pengendalian sumber daya. Oleh karena itu, kerangka yang lebih ringkas namun komprehensif, sejalan dengan George R. Terry, diadopsi oleh Sari et al., (2022, hlm.20) yang merangkum fungsi pengelolaan menjadi empat komponen inti, di antaranya; perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan.

2.1.1.2 Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan langkah awal yang krusial, berfokus pada pemilihan jalur tindakan terbaik untuk mencapai sasaran kelompok yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, perencanaan adalah proses analisis rasional dan sistematis (seperti menjawab pertanyaan *apa, bagaimana, siapa, mengapa, dan kapan*) yang diakhiri dengan pengambilan keputusan mengenai opsi-opsi yang paling prospektif. Menurut Jeka et al., (2024) Perencanaan, atau *planning*, dapat dipahami sebagai suatu proses fundamental dalam organisasi yang mencakup dua langkah utama: pertama, menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan kedua, menyusun "peta kerja" atau rencana tindakan yang merinci cara pencapaian tujuan tersebut. Artinya, perencanaan adalah aktivitas pengambilan keputusan yang menentukan secara spesifik tujuan seseorang, lembaga atau organisasi, tindakan apa

yang akan dilakukan untuk mencapainya, serta siapa yang akan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaannya.

Menurut Mulyadi & Winarso (2020.hlm.4) Perencanaan yang unggul haruslah menjadi fondasi yang berorientasi pada hasil bukan sekadar daftar keinginan, melainkan sebuah instrumen strategis yang berawal dari tujuan yang terdefinisi dengan baik dan mampu menyesuaikan diri dengan realitas operasional yang berubah, menjaga keseimbangan antar komponen, dan pada akhirnya, berfungsi sebagai katalis untuk mengefektifkan setiap sumber daya yang dimiliki. Dari perspektif praktik pengelolaan, perencanaan diorganisasikan dalam tiga tingkatan yang saling mendukung, mencerminkan lingkup dan horizon waktu tanggung jawab:

1) Perencanaan Tingkat Puncak (*Top Level Planning*)

Tingkatan ini mewakili perencanaan strategis organisasi. Ini adalah horizon terluas, di mana para eksekutif bertanggung jawab merumuskan visi jangka panjang dan sasaran utama yang bersifat menyeluruh. Rencana ini memberikan arah umum (*general guidelines*) dan berfungsi sebagai payung bagi semua aktivitas di bawahnya, menuntut pengambilan keputusan fundamental yang menentukan nasib organisasi.

2) Perencanaan Tingkat Menengah (*Middle Level Planning*)

Perencanaan di jenjang ini beralih fokus menjadi lebih administratif dan taktis. Manajemen menengah (kepala divisi atau departemen) bertugas sebagai penerjemah, mengonversi tujuan strategis yang luas menjadi cara-cara operasional yang konkret. Tanggung jawab mereka adalah menyusun rencana yang memuat berbagai langkah dan program yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang digariskan oleh manajemen puncak.

3) Perencanaan Tingkat Rendah (*Low Level Planning*)

Ini adalah ranah perencanaan operasional, yang langsung berfokus pada implementasi harian dan hasil produksi. Rencana pada level ini sangat detail, mengarahkan aktivitas spesifik yang harus dilakukan oleh staf pelaksana. Manajemen pelaksana memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa

setiap kegiatan operasional berjalan efisien sesuai rencana, berkontribusi langsung pada pencapaian target jangka pendek organisasi.

2.1.1.3 Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah suatu proses mengatur, menentukan tugas dan pola hubungan sekelompok orang kearah tujuan yang sama, agar setiap orang yang berada dalam organisasi tersebut mengetahui dengan jelas tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang mereka. Prosesnya meliputi pemecahan tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, penugasan tugas tersebut kepada individu yang paling kompeten, dan koordinasi aktif dari semua aset organisasi demi merealisasikan tujuan bersama. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang berfokus pada penghimpunan dan pemanfaatan semua sumber daya yang tersedia secara efektif demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, dalam proses ini, peran seorang administrator atau manajer sangat krusial, sebab mereka bertanggung jawab untuk menentukan pembagian tugas dan menetapkan siapa yang melakukan apa agar semua kegiatan dapat terstruktur dan terarah menuju sasaran yang telah direncanakan (Jeka et al., 2024).

2.1.1.4 Penggerakan (*Actuating/Leading*)

Fungsi utama dari Penggerakan adalah memobilisasi dan memimpin personel. Fungsi ini memastikan bahwa tenaga kerja tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, tetapi juga termotivasi dan terkoordinasi (melalui aspek-aspek seperti komunikasi, kepemimpinan, dan dinamika kelompok) agar dapat bekerja secara produktif menuju target yang telah ditentukan organisasi. Menurut Faiz et al., (2024) Penggerakan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang berfokus pada tindakan untuk mewujudkan hasil dari tahap perencanaan dan pengorganisasian. Fungsi ini esensial karena mencakup keseluruhan proses memanfaatkan fasilitas yang tersedia dan mendorong tenaga kerja agar berkomitmen melaksanakan tugas bersama demi tercapainya tujuan organisasi. Untuk mencapai hal tersebut, penggerakan melibatkan serangkaian teknik penting seperti kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi.

2.1.1.5 Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah fungsi evaluasi yang vital untuk mengukur dan menilai hasil kerja secara nyata yang telah dicapai. Dapat disamakan dengan pengendalian, fungsi ini memastikan bahwa seluruh kegiatan dan proses yang berlangsung tetap berada pada jalurnya dan sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Tumanggor et al., (2021.hlm.9) Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berperan penting dalam mencatat kemajuan organisasi menuju tujuan, memungkinkan manajer mendeteksi dan memperbaiki penyimpangan dari rencana sebelum terlambat. Namun, di banyak lembaga pendidikan, fungsi pengawasan justru keliru karena tidak dirancang untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan produktivitas yang sebenarnya. Sebaliknya, jika pengawasan cenderung terlalu fokus pada kegiatan pendukung, seperti sekadar mencatat kemajuan atau pendekatannya yang tidak tepat untuk mencapai visi dan misi institusi, pada akhirnya akan mengakibatkan kualitas lulusan yang kompetitif sulit terwujud. Fungsi pengawasan (*controlling*) menurut Mulyadi & Winarso, (2020) dapat berjalan secara efektif apabila memperhatikan beberapa aspek krusial berikut:

- 1) *Routing* (Penetapan Alur) Manajer perlu menetapkan alur atau jalur yang sistematis untuk mengidentifikasi dan melacak sumber utama terjadinya penyimpangan atau kesalahan kinerja. Ini memastikan bahwa upaya pengawasan terfokus pada titik-titik kritis di mana kesalahan sering muncul.
- 2) *Scheduling* (Penjadwalan Pengawasan) Penetapan waktu pelaksanaan pengawasan harus dilakukan secara cermat. Perlu dipertimbangkan bahwa pengawasan yang dilakukan secara terjadwal mungkin tidak selalu efisien dalam mengungkap kesalahan, sementara pengawasan mendadak (*unannounced*) justru sering kali lebih efektif dalam memberikan gambaran kinerja yang sebenarnya dan menemukan penyimpangan yang tersembunyi.
- 3) *Dispatching* (Penyampaian Evaluasi) Aspek ini melibatkan penyampaian hasil evaluasi kinerja secara langsung kepada unit atau individu yang didelegasikan. Manajemen bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan

kesalahan yang ditemukan dan menyediakan solusi perbaikan yang spesifik dan terperinci.

- 4) *Follow-Up* (Tindak Lanjut) Ini adalah proses tindak lanjut dan penyampaian informasi berkelanjutan. Masalah yang telah dikomunikasikan dan didiskusikan harus ditindaklanjuti melalui langkah-langkah korektif yang konkret sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan terhadap kesalahan kinerja.

2.1.2 Konsep Pendidikan Nonformal

Kehadiran lembaga pendidikan nonformal menunjukkan sebuah misi mendasar: mengubah pandangan masyarakat bahwa belajar hanya sebatas perolehan ijazah. Sejatinya, pendidikan adalah proses holistik untuk menginternalisasi ilmu pengetahuan yang vital. Tujuannya bukan sekadar sertifikasi, melainkan untuk menghasilkan peningkatan nyata dalam kualitas hidup individu dan kemajuan kolektif masyarakat di segala bidang. Didasarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pada Pasal 26 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Bentuk satuan pendidikan nonformal meliputi kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), majelis taklim, dan satuan pendidikan sejenis lainnya. Dengan demikian, pendidikan nonformal memiliki peran strategis dalam menyediakan kesempatan belajar yang lebih luas dan fleksibel bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal maupun yang membutuhkan peningkatan kompetensi tertentu.

Pendidikan nonformal (PNF) menjadi usaha dalam mendukung perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat.

Jenis layanan dan satuan pembelajaran PNF, yaitu meliputi:

- 1) Pendidikan Kecakapan hidup.
- 2) Pendidikan Anak Usia dini.
- 3) Pendidikan Kepemudaan
- 4) Pendidikan Kesetaraan.
- 5) Pendidikan pemberdayaan beragam perempuan.
- 6) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik maupun masyarakat.

2.1.3 Komponen Sistem Pengelolaan Pendidikan Nonformal

Menurut Sudjana (2010) Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk membedakan pendidikan formal dan nonformal ialah dengan membandingkan komponen, proses dan tujuan kedua subsistem pendidikan tersebut. Hubungan fungsional antara komponen, proses dan tujuan pendidikan nonformal adalah sebagai berikut:

1. Masukan lingkungan (*environmental input*) merupakan faktor eksternal yang berperan sebagai daya dukung maupun akselerator dalam keberlangsungan program pendidikan. Komponen ini mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sosial, kelompok sosial, komunitas, dan sebagainya, serta lingkungan alam. Selain itu, masukan ini juga melibatkan dimensi lingkungan fisik atau alam yang meliputi kondisi iklim, letak geografis, serta aksesibilitas lokasi tempat tinggal peserta didik. Menurut Hoy & Miskel (dalam Lintong et al., 2025.hlm.13) Sebagai sebuah sistem terbuka, satuan pendidikan dituntut untuk senantiasa adaptif dan responsif terhadap berbagai dinamika lingkungan di sekitarnya. Konsekuensinya, manajemen pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek internal, tetapi juga harus mencakup upaya strategis dalam membangun relasi

harmonis dengan masyarakat, memperluas kemitraan dengan sektor dunia usaha dan industri (DUDI), serta melakukan analisis komprehensif terhadap tren maupun isu eksternal.

2. Masukan Sarana (*instrumental input*) mencakup keseluruhan sumber daya, fasilitas, dan instrumen strategis yang dipersiapkan untuk menunjang keberlangsungan kegiatan belajar masyarakat. Komponen ini meliputi tujuan program, kurikulum, pendidik (tutor/fasilitator), tenaga kependidikan, fasilitas dan sumber belajar, media, pendanaan, hingga sistem pengelolaan program itu sendiri.
3. Masukan mentah (*raw input*) dalam sistem pendidikan nonformal merujuk pada peserta didik dengan segala kompleksitas karakteristik individual yang dimilikinya. Komponen ini mencakup faktor internal seperti kapasitas kognitif, pengalaman terdahulu, sikap, minat, serta kebutuhan belajar yang spesifik. Selain itu, *raw input* juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang meliputi latar belakang ekonomi keluarga, tingkat pendidikan orang tua, hingga kondisi sosial dan kebiasaan belajar di rumah.
4. Proses (*process*) adalah inti interaksi edukatif yang mempertemukan *instrumental input* (pendidik) dengan *raw input* (peserta didik) melalui aktivitas pembelajaran, bimbingan penyuluhan, Pelatihan, serta dan evaluasi. Fokus utamanya terletak pada reposisi peran pendidik sebagai fasilitator yang mendorong kemandirian belajar, bukan sekadar pengajar konvensional. Dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar, media digital, pengalaman narasumber, hingga lingkungan alam, proses ini menciptakan transformasi pengetahuan yang partisipan dan kolaboratif. Proses Pembelajaran menggunakan pendekatan bervariasi, diantaranya ialah pendekatan kontinum dari pedagogi ke andragogi, atau Sebaliknya. Cross menjelaskan bahwa pedagogi merupakan ilmu dan seni mengajar anak-anak, sedangkan andragogi adalah seni mengajar orang dewasa.

5. Keluaran (*output*) merepresentasikan kuantitas serta kualitas perubahan perilaku lulusan sebagai hasil dari proses pembelajaran. Perubahan tersebut mencakup penguasaan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Dalam perspektif pendidikan masyarakat, orientasi lulusan tidak hanya terbatas pada kesiapan kerja, tetapi lebih menekankan pada transformasi kualitas hidup. Oleh karena itu, penguasaan keterampilan fungsional menjadi prioritas utama guna memastikan lulusan mampu berkontribusi dan beradaptasi secara optimal di tengah masyarakat.
6. Masukan lain (*other input*) merupakan daya dukung eksternal yang memungkinkan peserta didik maupun lulusan mengaktualisasikan kompetensinya demi peningkatan kualitas hidup. Komponen ini mencakup aksesibilitas terhadap lapangan kerja, ketersediaan modal usaha, jaringan informasi, dukungan fasilitas, serta eksistensi paguyuban alumni atau latihan lanjutan.
7. Pengaruh (*impact*) merupakan signifikansi hasil belajar lulusan yang tecermin melalui transformasi kualitas hidup dan kontribusi sosial. Secara individual, hal ini ditandai dengan kemandirian ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta kemampuan melakukan transfer pengetahuan (*knowledge sharing*) kepada lingkungan sekitar. Secara kolektif, keberhasilan program diukur dari eskalasi partisipasi aktif lulusan dalam pembangunan masyarakat, baik melalui sumbangsih pemikiran, tenaga, maupun dukungan materiil sebagai wujud pemberdayaan yang berkelanjutan.

2.1.4 Pendidikan Kesetaraan Paket A

Pendidikan kesetaraan dipandang sebagai salah satu bentuk pendidikan nonformal yang menyediakan layanan pembelajaran melalui Program Paket A yang setara SD, Program Paket B setara SMP, dan Program Paket C setara SMA. Program ini menitikberatkan pada peningkatan pengetahuan,

keterampilan, serta pengembangan sikap dan kepribadian peserta didik. Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat melalui berbagai lembaga, antara lain Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Pelatihan Kursus (LPK), organisasi sosial dan kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta pondok pesantren. Menurut Thoif, (2021), Peserta didik program paket A diklasifikasikan dalam dua kelompok usia: usia sekolah dan usia dewasa. Anak jalanan, anak nelayan, dan pekerja anak adalah contoh usia sekolah. Namun, usia dewasa adalah mereka yang sudah bekerja atau masuk ke masyarakat tetapi belum mendapatkan pendidikan dasar. Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan oleh masyarakat menunjukkan dinamika dan variasi kualitas yang dipengaruhi oleh beragam faktor. Perbedaan kemampuan peserta didik, kapasitas lembaga penyelenggara, serta kondisi lingkungan setempat berkontribusi signifikan terhadap mutu lulusan program pendidikan kesetaraan di berbagai daerah.

Program pendidikan kesetaraan dirancang untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi individu yang belum menempuh atau menyelesaikan pendidikan formal. Program ini mencakup berbagai mata pelajaran inti, seperti matematika, ilmu pengetahuan, bahasa, dan studi sosial, yang dipilih karena relevan dengan kebutuhan dasar setiap warga negara. Melalui penguasaan materi-materi tersebut, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik yang fundamental, tetapi juga keterampilan hidup yang praktis, seperti kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi efektif, dan memahami lingkungan sosialnya. Dengan bekal tersebut, mereka diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup, memperluas peluang kerja, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta berpartisipasi secara aktif dan produktif dalam kehidupan bermasyarakat (Ramadhan et al., 2023).

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan kesetaraan dimaksudkan untuk menyediakan akses pendidikan

seluas-luasnya bagi masyarakat yang, karena kondisi tertentu, tidak dapat atau memilih untuk tidak mengikuti pendidikan formal. Dalam pandangan penulis, ketentuan ini menunjukkan komitmen negara untuk menjamin hak belajar setiap warga negara melalui jalur pendidikan nonformal yang setara dengan pendidikan formal. Lebih lanjut, pada Pasal 50 ayat (1) poin b, ditegaskan bahwa pendidikan kesetaraan juga berfungsi mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Penulis memandang bahwa aspek ini bukan sekadar penguasaan materi akademik, tetapi juga proses pembentukan sikap, nilai moral, dan etika yang menjadi landasan penting pembentukan pribadi. Proses ini berlangsung secara terpadu melalui pendidikan formal maupun nonformal sehingga menghasilkan individu yang cerdas, berintegritas, bertanggung jawab, serta siap menghadapi tantangan kehidupan. Dengan demikian, pendidikan kesetaraan bukan hanya memberikan akses, tetapi juga menjamin kualitas pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi dan karakter.

2.1.5 Homeschooling

2.1.5.1 Definisi Homeschooling

Homeschooling, atau pendidikan di rumah, adalah sebuah metode pendidikan non-tradisional di mana orang tua atau wali mengambil peran sebagai pendidik utama bagi anak-anak mereka. Pendekatan ini menawarkan pendidikan yang sangat personal, memungkinkan kurikulum dan cara pengajaran disesuaikan secara fleksibel agar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan potensi unik dari setiap anak (Saputra et al., 2024). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 27, dijelaskan bahwa pendidikan informal memiliki kedudukan yang sah dan menjadi bagian penting dari sistem pendidikan di Indonesia.

- 1) Pelaksanaan pendidikan informal oleh keluarga maupun lingkungan diwujudkan melalui kegiatan belajar yang dilakukan secara mandiri.
- 2) Hasil dari proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh pengakuan yang setara dengan pendidikan formal dan

nonformal apabila peserta didik berhasil lulus dalam ujian yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.

UNESCO (2025), *Homeschooling* merupakan bentuk pendidikan yang berpusat pada peran orang tua, dilakukan di lingkungan rumah dengan pendekatan fleksibel dan tanggung jawab penuh dari keluarga. Berbeda dari pendidikan formal maupun nonformal lainnya, homeschooling memberi kebebasan dalam menentukan waktu, metode, dan sumber belajar, meski tetap dapat memanfaatkan fasilitas publik atau komunitas. Namun, kualitas pendidikan dalam *homeschooling* tidak selalu terjamin, karena sangat bergantung pada sejauh mana pelaksanaannya memenuhi standar nasional dan prinsip hak asasi manusia, seperti aksesibilitas, relevansi kurikulum, dan keberagaman peserta didik. Tantangan utama meliputi pendaftaran, inspeksi, dan evaluasi hasil belajar yang efektif untuk menjamin mutu dan keadilan.

2.1.5.2 Model *Homeschooling*

Menurut (Nor Annisa et al., 2022) *Homeschooling* memiliki banyak ragam model yang berkembang pesat, dan pemilihan model ideal sangat bergantung pada gaya belajar individual anak dan filosofi pendidikan keluarga. Secara inheren, *homeschooling* bersifat unik (*unique*) karena setiap keluarga membawa latar belakang, nilai, dan sumber daya yang berbeda. Model-model utama yang populer dan berkembang dalam praktik *homeschooling* meliputi:

1. *Unit Studies Approach* (Pendekatan Studi Unit): Model pendidikan ini berpusat pada tema unit (*unit study*), di mana siswa secara simultan mempelajari berbagai mata pelajaran (seperti Sejarah, Sains, dan Bahasa) melalui lensa tema tunggal yang terintegrasi. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa proses belajar seharusnya terintegrasi secara holistik, bukan dipecah-pecah menjadi disiplin ilmu yang terpisah.
2. *The Living Book Approach* (Pendekatan Buku Hidup): Dikembangkan berdasarkan filosofi Charlotte Mason, model ini memprioritaskan penggunaan pengalaman dunia nyata dan literatur berkualitas tinggi

(Living Books)—bukan sekadar buku teks—untuk mengajar. Pembelajaran sering kali diperkaya melalui aktivitas langsung seperti kunjungan ke museum atau eksplorasi alam, menjadikan pengetahuan lebih hidup dan berkesan.

3. *The Classical Approach* (Pendekatan Klasik): Model ini menekankan penggunaan kurikulum yang sangat terstruktur dan linear. Kurikulum ini dibagi berdasarkan tahapan perkembangan kognitif anak—sering disebut sebagai *Trivium* (Tata Bahasa, Logika, dan Retorika)—dengan fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi yang mendalam.
4. *The Waldorf Approach* (Pendekatan Waldorf): Dikembangkan oleh Rudolf Steiner, model ini, yang banyak diterapkan di Amerika, berupaya menciptakan suasana belajar yang mirip dengan lingkungan rumah namun dengan fokus yang kuat pada pengembangan fisik, emosional, dan spiritual anak. Metode pembelajarannya menekankan pada seni, kreativitas, dan imajinasi sesuai tahapan perkembangan anak.
5. *The Montessori Approach* (Pendekatan Montessori): Model ini, yang berasal dari karya Dr. Maria Montessori, mendorong penyiapan lingkungan pendukung yang nyata dan alami (Prepared Environment). Pendekatan ini fokus pada pengamatan mendalam terhadap interaksi anak-anak dengan lingkungan tersebut, memfasilitasi pengembangan potensi fisik, mental, dan spiritual mereka melalui eksplorasi dan belajar mandiri.
6. *The Eclectic Approach* (Pendekatan Eklektik): Model ini memberikan fleksibilitas terbesar karena memungkinkan keluarga untuk mendesain program pendidikan sendiri dengan menggabungkan dan memilih elemen-elemen terbaik dari dua atau lebih model *homeschooling* lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan unik anak dan keluarga.
7. *Unschooling Approach* (Pendekatan Belajar Alami): Model ini berakar pada pandangan bahwa anak-anak memiliki keinginan natural dan intrinsik untuk belajar. Pembelajaran tidak didasarkan pada buku teks atau kurikulum wajib, melainkan sepenuhnya berangkat dari minat, rasa ingin

tahu, dan pertanyaan anak sendiri, di mana peran orang tua adalah sebagai fasilitator aktif.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Berbagai penelitian sebelumnya memberikan landasan penting bagi penelitian mengenai pengelolaan Program Paket A di *Homeschooling* Al-Qur'an Bina Insani Ciamis. Penelitian yang dilakukan oleh Chintya Suci Nurhayati (2023) dengan judul “Pengelolaan Program Tahfidz Al-Qur'an di Pondok Pesantren Putri Hikmatul Mubtadiaat Bandar Lampung”, bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana program penghafalan Al-Qur'an tersebut dikelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan program telah dilaksanakan secara sistematis mengikuti empat fungsi manajemen G.R. Terry, dimulai dari Perencanaan (*Planning*) yang dilakukan melalui musyawarah di awal tahun ajaran untuk menetapkan kriteria dan tujuan; dilanjutkan dengan Pengorganisasian (*Organizing*) yang mencakup penetapan kriteria guru pembimbing, pembagian tugas, dan komunikasi antar staf; kemudian Pelaksanaan (*Actuating*) yang dilakukan tiga kali sehari dengan metode menghafal yang bervariasi serta pembagian jadwal; hingga akhirnya Pengawasan (*Controlling*) yang melibatkan semua guru dan wali santri, menggunakan buku setoran dan *murajaah*, serta evaluasi melalui ujian individu dan semester. Temuan ini relevan dengan rencana penelitian penulis sebagai acuan karena menegaskan pentingnya penerapan fungsi-fungsi manajemen (POAC) yang efektif dan terstruktur dalam mengelola program pendidikan non-formal yang memiliki tujuan spesifik.

Selanjutnya penelitian Nurhayati dan Suprpto (2020) yang berjudul “Evaluasi Program Pendidikan Kesetaraan Paket A bagi Anak Putus Sekolah di Kabupaten Gorontalo” yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 2. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dan analisis data kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil evaluasi CIPP menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai

standar, terbukti dari kesesuaian Konteks dengan kebijakan berlaku, pemenuhan Input (tutor berkualifikasi S1, sarana-prasarana memadai, dan kurikulum SKK), serta Proses pembelajaran yang fleksibel dan terstruktur. Sebagai Produk, program ini berhasil meningkatkan akses pendidikan dasar bagi anak putus sekolah dan membekali lulusan dengan kecakapan hidup yang setara dengan lulusan SD/MI. Temuan ini sangat relevan karena secara komprehensif memperlihatkan bagaimana keberhasilan Program Paket A ditopang oleh faktor kebijakan, sumber daya, proses pembelajaran, dan pendanaan, yang menjadi acuan penting untuk menguatkan analisis dalam penelitian Anda mengenai pengelolaan Program Paket A di *Homeschooling* Al-Qur'an Bina Insani Ciamis.

Sementara itu, dalam penelitian Nurain Karnain dan Abd. Hamid Isa (2024) yang berjudul "Efektivitas Pengelolaan Pembelajaran Pada Program Kesetaraan Paket C Berbasis Pendidikan Masyarakat Di SKB Tolanghula Kabupaten Gorontalo". Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pembelajaran masih menghadapi sejumlah kendala. Pada aspek perencanaan, meskipun telah mencakup penyusunan langkah-langkah tujuan, target, dan standar keberhasilan, hasil penelitian mengungkapkan bahwa perencanaan yang dilakukan belum berjalan efektif sehingga belum mampu memandu jalannya pembelajaran secara optimal. Pelaksanaan pembelajaran juga dinilai belum efektif, karena keterlibatan peserta didik sangat rendah; banyak di antara mereka hanya hadir menjelang ujian, sehingga tujuan pembelajaran sulit dicapai. Sementara itu, penilaian pembelajaran sudah dijalankan dengan cukup baik oleh kepala SKB dan tenaga pendidik, meskipun sebagian besar peserta didik masih belum berhasil mencapai standar yang diharapkan. Adapun pada aspek tindak lanjut, lembaga belum maksimal dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar serta memberikan motivasi yang sesuai bagi peserta didik. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas pengelolaan program pendidikan nonformal sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut yang dilakukan. Temuan tersebut

dapat menjadi cerminan bahwa pengelolaan lembaga pendidikan nonformal pada umumnya, termasuk yang menjadi fokus penelitian ini, masih memerlukan perbaikan dan inovasi agar mampu menjawab kebutuhan serta tantangan masyarakat secara lebih efektif.

Kemudian penelitian Desy Debora Barus, Daeng Ayub, dan Ria Rizkia Alvi (2023) Berjudul "Manajemen Pembelajaran Komunitas *Homeschooling* Kak Seto Pekanbaru" yang dimuat dalam *Innovative: Journal Of Social Science Research* bertujuan mendeskripsikan sistem manajemen pembelajaran yang digunakan pada sistem komunitas *Homeschooling* Kak Seto Pekanbaru. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini menemukan bahwa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, manajemen pembelajaran di *Homeschooling* Kak Seto dilaksanakan secara sistematis melalui empat tahap: Perencanaan (meliputi penyusunan Program Tahunan, Semester, Silabus, dan RPP di setiap awal semester), Pelaksanaan (dilakukan secara fleksibel dengan sistem komunitas dan *distance learning* serta berbagai teknik dan model pembelajaran), Pengawasan (dilakukan rutin oleh Koordinator *Homeschooling* meliputi peninjauan catatan kehadiran dan rencana pembelajaran melalui diskusi/rapat kerja), dan Penilaian/Evaluasi (menggunakan penilaian sumatif—kuis lisan/tertulis—dan formatif—pengamatan sikap dan nilai sosial—serta ujian tengah dan akhir semester). Temuan ini relevan dengan rencana penelitian penulis sebagai acuan karena menguatkan penggunaan kerangka manajemen empat fungsi (*Planning, Implementation, Monitoring/Controlling, dan Assessment*) sebagai lensa analisis yang efektif dalam mengelola program pendidikan non-formal seperti *homeschooling*.

Terakhir, penelitian Firmansyah, Marlina, dan Suminar (2025) yang berjudul "Pengelolaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B di SPNF SKB Kabupaten Karawang" diterbitkan dalam Jurnal Comm-Edu (*Community Education Journal*) Vol. 8 No. 3. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dengan fokus pada aspek perencanaan, pelaksanaan,

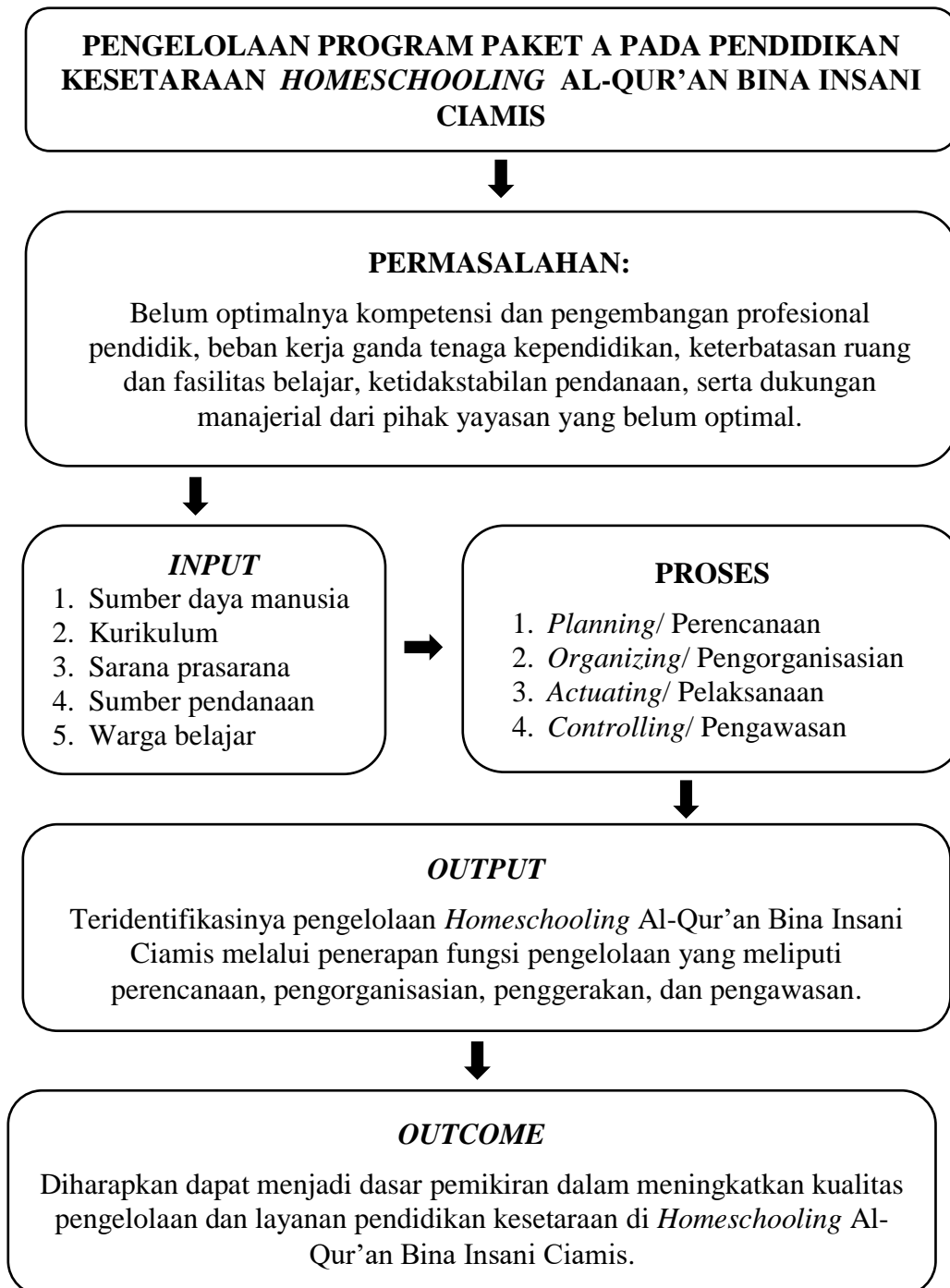
evaluasi, serta faktor pendukung dan penghambat program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan program telah dilaksanakan secara sistematis, diawali dengan identifikasi kebutuhan belajar masyarakat, dilanjutkan dengan pelaksanaan yang mengadopsi prinsip andragogi serta pembelajaran tematik dan kontekstual, hingga evaluasi yang mencakup supervisi, refleksi tutor, dan penilaian berbasis proyek/portofolio. Keberhasilan program ditopang oleh antusiasme warga belajar dan dukungan masyarakat, meskipun menghadapi hambatan berupa keterbatasan sarana dan ketidaksesuaian latar belakang tutor. Keberhasilan program ditopang oleh antusiasme warga belajar dan dukungan masyarakat, meskipun menghadapi hambatan berupa keterbatasan sarana dan ketidaksesuaian latar belakang tutor. Temuan ini relevan sebagai landasan empiris untuk penelitian mengenai Paket A di *Homeschooling* Al-Qur'an Bina Insani Ciamis, karena menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan kesetaraan sangat bergantung pada kualitas manajemen, pendidik, dan partisipasi *stakeholder* yang berkelanjutan.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan antara permasalahan, *input*, proses, *output* dan *outcome* dalam pengelolaan Program Paket A pada Pendidikan Kesetaraan di *Homeschooling* Al-Qur'an Bina Insani Ciamis. Kerangka ini digunakan sebagai landasan dalam menganalisis bagaimana program dikelola serta bagaimana berbagai unsur didalamnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Permasalahan utama yang dihadapi lembaga meliputi keterbatasan kompetensi dan pengembangan profesional pendidik, adanya tenaga kependidikan yang merangkap tugas, keterbatasan ruang dan fasilitas pembelajaran, pendanaan yang minim dan tidak stabil, serta dukungan manajerial dari pihak yayasan yang masih belum optimal. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan program pendidikan kesetaraan, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pembelajaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengkaji berbagai komponen input yang menjadi dasar dalam pengelolaan program, meliputi sumber daya manusia, kurikulum, sarana, dana, dan warga belajar. Input tersebut selanjutnya dikelola melalui proses pengelolaan yang mengacu pada teori George. R. Terry yaitu teori POAC, Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan/*Actuating*, dan Pengawasan (*Controlling*). Pada tahap perencanaan, lembaga menyusun program pembelajaran dan kegiatan pendukung. Tahap pengorganisasian meliputi pembagian tugas dan pengelolaan sumber daya. Adapun tahap pelaksanaan mencakup kegiatan pembelajaran dan pendampingan warga belajar, kemudian tahap pengawasan dilakukan melalui evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program.

Melalui pengelolaan yang menerapkan fungsi-fungsi tersebut, diharapkan dapat menghasilkan output berupa teridentifikasinya pengelolaan program paket A di *Homeschooling* Al-Qur'an Bina Insani Ciamis melalui penerapan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara sistematis. Selanjutnya, outcome yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersedianya dasar pemikiran dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan layanan pendidikan kesetaraan di *Homeschooling* Al-Qur'an Bina Insani Ciamis. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong terciptanya pengelolaan program yang lebih efektif, efisien dan berkelanjutan dalam mendukung keberlangsungan program paket A di masa mendatang.



Gambar 1. Kerangka Konseptual